

AUDIENSI DEWAN PENGARAH OGI - 1



**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /
KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
DR. IR. H. SUHARSO MONOARFA**

Jakarta (2/8) – Dewan Pengarah Open Government Indonesia (OGI), melakukan audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (MPPN/Bappenas), Bapak Suharso Monoarfa, pada hari Senin 2 Agustus 2021. Pertemuan ini digagas oleh Dewan Pengarah OGI dengan tujuan menguatkan peran OGI di Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh Dewan Pengarah OGI yang terdiri atas perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan Kantor Staf Presiden, serta Bapak Yanuar Nugroho selaku OGP Special Envoy dan Tim Sekretariat Nasional OGI.

Jakarta (2/8) – The Open Government Indonesia (OGI) Steering Committee held an audience with the Minister of National Development Planning / Head of the National Development Planning Agency, Mr. Suharso Monoarfa, on Monday 2 August 2021. This meeting was initiated by the OGI Steering Committee aiming to strengthening OGI's role in Indonesia. This activity was attended by the OGI Steering Committee consisting of representatives from the Ministry of National Development Planning/Bappenas, the Ministry of Foreign Affairs, and the Presidential Staff Office, as well as Mr. Yanuar Nugroho as OGP Special Envoy and the OGI National Secretariat.

Pertama, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bapak Slamet Soedarsono, menyampaikan dua hal penting terkait pentingnya keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan dan usulan revisi Keputusan Menteri PPN agar Kementerian Dalam Negeri dapat dilibatkan untuk bersinergi mengelola OGP Local. Selanjutnya, Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri, Bapak Febrian Alphyanto Ruddyard, menyampaikan bahwa praktik-praktik keterbukaan pemerintah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dapat dijadikan showcase dan direfleksikan dalam kegiatan-kegiatan internasional seperti G20 maupun ASEAN. Bapak Ruddyard juga menyampaikan bahwa keterbukaan menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan agar Indonesia bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Oleh sebab itu, dengan memanfaatkan posisi Indonesia di Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX), Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri juga dapat mendorong terwujudnya keterbukaan pemerintah di negara-negara lainnya. Tenaga Ahli Utama Kedeputan V KSP, Bapak Rumadi Ahmad, yang mewakili Deputi V Kantor Staff Presiden (KSP), juga menyampaikan dukungannya untuk ikut memperkuat peran Indonesia dalam OGP serta mendorong adanya penguatan dari Sekretariat OGI baik secara regulasi, anggaran, maupun sumber daya lainnya.

Bapak Sugeng Bahagijo selaku Direktur Eksekutif INFID juga hadir sebagai salah satu perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Dewan Pengarah OGI. Beliau menyampaikan mengenai posisi Indonesia yang jauh lebih baik dibandingkan negara tetangga lainnya jika diukur dari segi keterbukaan pemerintah. Beliau juga menyampaikan bahwa posisi tersebut dapat menjadi peluang Indonesia untuk meraih penghargaan global maupun mendorong praktik baik keterbukaan pemerintah di negara lainnya.

First, the Deputy for Politics, Law, Defense and Security at Bappenas, Mr. Slamet Soedarsono, conveyed two important points regarding the importance of open government and the proposed revision of the Minister of National Development Planning Decree on OGI so that the Ministry of Home Affairs could be involved in managing OGP Local. Furthermore, the Director-General of Multilateral Cooperation of the Ministry of Foreign Affairs, Mr. Febrian Alphyanto Ruddyard, said that the open government practices that have been implemented by the Government of Indonesia can be used as a showcase and be reflected in international activities such as the G20 and ASEAN. Mr. Ruddyard also said that transparency is one key consideration for Indonesia to get COVID-19 vaccine. Therefore, by taking advantage of Indonesia's position in the Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX), Indonesia through the Ministry of Foreign Affairs can also encourage the practice of open government in other countries. The Main Expert Staff of Deputy V KSP, Mr. Rumadi Ahmad, who represented Deputy V of the Presidential Staff Office (KSP), also expressed his support for strengthening Indonesia's role in OGP and strengthening the OGI Secretariat both in terms of regulations, budgets, and other resources.

Mr. Sugeng Bahagijo as Executive Director of INFID was also present as one of the representatives of Civil Society Organizations (CSOs) on the OGI Steering Committee. He explained Indonesia's position in the implementation of open government which is much better than other neighboring countries. He also said that this position could be an opportunity for Indonesia to win global awards and encourage good practices of open government in other countries.

Bapak Yanuar Nugroho, selaku OGP Special Envoy menyampaikan, keterbukaan pemerintah dapat menjadi suatu legasi yang penting bagi kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo. Selain itu, Bapak Yanuar juga menyampaikan perlunya wadah untuk menampilkan praktik baik keterbukaan pemerintah yang dilakukan di tingkat lokal melalui OGP Local.

Pertemuan tersebut ditutup dengan tanggapan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bapak Suharso Monoarfa. Beliau menyampaikan dukungannya terhadap praktik keterbukaan pemerintah dalam rangka mewujudkan good governance di Indonesia. Selain itu, beliau juga menyampaikan sudah ada upaya yang dilakukan untuk mendorong keterbukaan, yaitu program Satu Data Indonesia. Pada akhir tanggapan, Beliau menyampaikan bahwa penerapan keterbukaan pemerintah juga dapat diselaraskan dengan praktik Sustainable Development Goals yang hingga saat ini sudah sampai di tingkat desa.

Melalui audiensi ini, dukungan dari Menteri PPN/Kepala Bappenas diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah Indonesia untuk menghadirkan praktik-praktik baik keterbukaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Mr. Yanuar Nugroho, as OGP Special Envoy, said that open government could be an important legacy for Mr. President Joko Widodo leadership. In addition, Mr. Yanuar also emphasized the need for a forum to showcase good practices of open government at the local level through OGP Local.

The meeting was closed with a response from the Minister of National Development Planning/Head of Bappenas, Mr. Suharso Monoarfa. He expressed his support for the open government practice in the context of realizing good governance in Indonesia. In addition, he also said that some efforts have been initiated to encourage transparency through One Data Indonesia program. At the end of the response, he said that the implementation of open government could also be aligned with the practice of the Sustainable Development Goals which until now has reached the village level.

Through this audience, the support from the Minister of National Development Planning/Head of Bappenas is expected to further encourage the Indonesian government to implement good practices of open government both at the central and regional levels.